

## DAFTAR PUSTAKA

### A. BUKU

- A'an Efendi, Dyah Ochtorina, Rahmadi. *Penelitian Hukum Doktrinal*, (Yogyakarta: LaksBang Justitia, 2019).
- Adriaman, M. *Pengantar Metode Penelitian Ilmu Hukum*. (Sumatera Barat: Yayasan Tri Edukasi Ilmiah, 2024).
- Aermadepa, A., Apriyano, A., Mulyeni, Y., Judijanto, L., Lawra, R. D., & Nizwana, Y. *Penegakan Hukum Pemilu dalam Pemilihan Kepala Daerah Serentak Indonesia Tahun 2024*. (Jambi: PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2024).
- Badjoah, A. Politisasi Birokrasi Di Indonesia. *Demokrasi & Komunikasi Politik*. (Purbalingga: Eureka Media Aksara, 2023).
- Djulaeka, Devi Rahayu. *Metode Penelitian Hukum*. (Surabaya: Scopindo, 2020).
- Fajlurrahman Jurdi. *Hukum Tata Negara Indonesia*, (Jakarta: Prenada media Group, 2019).
- Johannes, A. W. *Pilkada Mencari Pemimpin Daerah*, (Bandung; Cendikia Press, 2020).
- Kenedi, J. *Kebijakan Hukum Pidana (Penal Policy) Dalam Sistem Penegakan Hukum Di Indonesia*. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017).
- Marzuki, M. *Penelitian hukum: Edisi revisi*. (Jakarta: Prenadamedia Group, 2023).
- Mawardi, I., & Nizar, M. *Keadilan Pemilu: Revitalisasi Kewenangan Bawaslu Sebagai Penegak Hukum Pemilu dan Efektivitas Bawaslu sebagai Banding Administratif*. (Jakarta: Nusamedia, 2023).
- Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. (Mataram: Mataram University Press, 2020).
- Mulyanti, P., & Rahmanuddin, T. *Hukum Pidana*. (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2015).
- Saiful Deni, A. *Komunikasi Politik*. (Jakarta: Eureka Media Aksara, 2023).
- Santoso, T., & Santoso, T. *Penegakan hukum pemilu: praktik pemilu 2004, kajian pemilu 2009-2014*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2006).

Seac, A. E. F. *Penguatan Bawaslu Dalam Penegakan Hukum Pidana Pemilu*. (Malang: Fianosa Publishing, 2022).

Sentosa, A., & Karya, B. *Perilaku Pemilih Pemula dalam Pilkada*. (Pekalongan: NEM, 2022).

Soekanto, S. *Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum*. (Depok: Raja Grafindo Persada, 2022).

Surbakti, R., Supriyanto, D., & Santoso, T. *Penanganan pelanggaran pemilu*, (Jakarta: Kemitraan bagi Pembaruan Tata Pemerintahan, 2011).

Tjenreng, M. B. *Pilkada serentak: penguatan demokrasi di Indonesia*. (Depok: Pustaka Kemang, 2016).

Waluyo, B. *Penegakan hukum di Indonesia*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2022).

Zainudin, A. *Sosiologi hukum*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2014).

## **B. JURNAL**

Ahmad, Junaidi, and Agmar Media. "Penegakan Hukum Kepemiluan Untuk Pemilu Bermartabat." *Jurnal Sosial Humaniora Sigli* 4, no. 1 (2021).

Anggara, Febrian, and Lutfian Ubaidillah. "Netralitas Asosiasi Kepala Desa Jember Dalam Pemilihan Kepala Daerah Di Kabupaten Jember." *Indonesian Journal of Law and Justice* 2, no. 1 (2024).

Arliman S, Laurensius. "Mewujudkan Penegakan Hukum Yang Baik Untuk Mewujudkan Indonesia Sebagai Negara Hukum." *Jurnal Hukum Doctrinal* 2, no. 2 (2020).

Candra, Fadhlil Ade, and Fadhillatu Jahra Sinaga. "Peran Penegak Hukum Dalam Penegakan Hukum Di Indonesia." *Edu Society: Jurnal Pendidikan, Ilmu Sosial Dan Pengabdian Kepada Masyarakat* 1, no. 1 (2023).

Fidyaningsih, A., & Wibowo, T, "Penegakan Hukum Dalam Penanganan Pelanggaran Pemilu Terhadap Netralitas Aparatur Desa Tahun 2024 Di Kabupaten Bojonegoro". *Justitiable-Jurnal Hukum*, 7(2), (2025)

Iffah Amaliah, Andi Nurul, and Andi Safriani. "Bentuk-Bentuk Pelanggaran Pemilu Yang Dilakukan Oleh Kepala Desa." *Alauddin Law Development Journal* 3, no. 2 (2021).

Khadijah, Sitti, Nur Fajri, and Ayu Chairun Nissa. "Penegakan Hukum Terhadap Prostitusi Di Era Literasi Digital." *Jurnal Ilmu Sosial, Politik Dan Hukum*, (2024).

- Muhammad Gazali Rahman. "Penegakan Hukum Di Indonesia." *Jurnal Al-Himayah* 4, no. Vol. 4 No. 1 (2020): Al Himayah (2020).
- Nasir, Iqbal. "Analisis Hukum Pelanggaran Administrasi Pemilu/Pemilihan." *Khazanah Hukum* 2, no. 1 (2020).
- Nurreka Sekar Arum, and Meydika Wahista Putri. "Optimalisasi Terhadap Pns Yang Menjadi Anggota Partai Politik Berdasarkan Asas Netralitas Asn." *Sinar Dunia: Jurnal Riset Sosial Humaniora Dan Ilmu Pendidikan* 1, no. 4 (2022).
- S Arliman, Laurensius. "Mewujudkan Penegakan Hukum Yang Baik Di Negara Hukum Indonesia." *Dialogia Iuridica (Jurnal Hukum Bisnis Dan Investasi)* 11, no. 1 (2019).
- S, Bambang. "Penanganan Tindak Pidana Pemilu Dalam Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (GAKKUMDU)." *Jurnal Indonesia Sosial Teknologi* 2, no. 2 (2021).
- Samosir, Mangaratua, Asmen Ridhol, Annisa Berliani, and Geofani Yusuf DM, MohdMilthree Saragih. "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Efektivitas Penegakan Hukum Dalam Pergaulan Masyarakat." *Jurnal Pendidikan Dan Konseling* 5, no. 2 (2023).
- Setiadi, E. "Kejahatan di Bidang Pemilu". *MIMBAR: Jurnal Sosial dan Pembangunan*, 19(1). (2023)
- Sinaga, P. "Pemilihan Kepala Daerah Dalam Konstruksi UUD NRI 1945". *Binamulia Hukum*, 7(1), (2018).
- Sugiharto, Imawan. "Netralitas Aparatur Sipil Negara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah." *Pena Justisia: Media Komunikasi Dan Kajian Hukum* 18, no. 1 (2020).
- Utama, Andrew Shandy. "Kepercayaan Masyarakat Terhadap Penegakan Hukum Di Indonesia." *Ensiklopedia Social Review* 1, no. 3 (2019).
- Wahyuni, Fitri, and Aris Irawan. "Kajian Hukum Terhadap Perangkat Desa Yang Ikut Serta Dalam Kampanye Pemilu Di Kabupaten Indragiri Hilir." *Selodang Mayang* 7, no. 2 (2021).

### **C. PERATURAN PERUNDANG UNDANGAN**

Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Undang – Undang No. 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang No. 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang No. 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang;

Undang – Undang No. 3 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang  
– Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa;

Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2018 Tentang Tata Cara  
Penyelesaian Tindak Pidana Pemilihan dan Pemilihan Umum;

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Tahapan  
Dan Jadwal Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan  
Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota Tahun 2024;

Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 13 Tahun 2024 Tentang Kampanye  
Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil  
Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota

Peraturan Badan Pengawas Pemilu (Perbawaslu) No. 9 Tahun 2024 Tentang  
Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum  
Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan  
Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta  
Wali Kota Dan Wakil Wali Kota

#### **D. WEBSITE**

Agus Subani, “MK Tegaskan Pejabat Negara Hingga Kepala Desa Bisa  
Dipidana Bila Langgar Netralitas dalam Pilkada”, hukum online.com,  
2024. <https://www.hukumonline.com/berita/a/mk-tegaskan-pejabat-negara-hingga-kepala-desa-bisa-dipidana-bila-langgar-netralitas-dalam-pilkada-1t6735eea636218/> Diakses pada 19 Desember 2024, Pukul 22.40.  
WIB.

Investigasi. “Kades Rambipuji Jember Diduga Langgar Undang-Undang  
Pilkada Soal Netralitas Kepala Desa. ”investigasi.news, 2024.  
<https://investigasi.news/nasional/jember/kades-rambipuji-jember-diduga-langgar/> Diakses pada 18 Desember 2024, Pukul 22:22 WIB.

Sigit Priyono. “Kades Dan Perangkat Desa Rambipuji Jadikan Balai Desa  
Tempat Kampanye Terselubung, Berkedok Funbike.” JEMBER TODAY.NET,  
2024. <https://jembertoday.net/kades-dan-perangkat-desa-rambipuji-jadikan-balai-desa-tempat-kampanye-terselubung-berkedok-funbike/>.  
Diakses pada 18 Desember 2024, Pukul 22:30 WIB.